

**MALPRAKTIK PROFESI PENEGAK HUKUM (STUDI PUTUSAN  
NO.336/K.PID.SUS/2015 DAN PUTUSAN  
NO.89/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ANDHIKA EKA PUTRA**

**C 100 130261**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**MALPRAKTIK PROFESI PENEGAK HUKUM**  
**( STUDI PUTUSAN No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan PUTUSAN**  
**No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ANDHIKA EKA PUTRA**

**C 100 130 261**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswardhani', written in a stylized, cursive script.

**(Kuswardhani, SH, MHum.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### MALPRAKTIK PROFESI PENEGAK HUKUM

( Studi Putusan No.336/K.Pid.sus/2015 dan Putusan  
No.89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)

Yang ditulis oleh:

ANDIKA EKA PUTRA

C.100.130.261

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Jumat,  
Tanggal: 19 Oktober 2018

Dewan Penguji:

1. **Kuswardani ,S.H,M.hum**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Hartanto ,S.H,M.hum**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Muchamad Iksan ,S.H,M.hum**  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Januari 2019  
Penulis



Andhika Eka Putra

## **MALPRAKTIK PROFESI PENEGAK HUKUM (STUDI PUTUSAN**

**NO.336/K.PID.SUS/2015 DAN PUTUSAN**

**NO.89/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana: b) Untuk mengetahui bentuk malpraktik yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst; c) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat. Bagi pemberi suap dikenakan Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 Ayat (1) KUHP. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5, 6, 11, dan 12 yang intinya memuat perbuatan suap menyuap; b) Bentuk Malpraktik yang Dilakukan oleh Hakim Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Advokat dalam dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Perilaku Hakim pada Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 melanggar ketentuan yang tercantum pada KUHP Pasal 419 Ayat (1). Pasal 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh Advokat melanggar hukum positif Indonesia, yaitu: Pasal 209 KUHP. Pasal 209 Ayat (1) KUHP dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00, Pasal 210 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur terhadap Pemberi Suap, diantaranya yaitu Pasal 5 dan Pasal 6. Pemberhentian terhadap hakim dengan tidak hormat tercantum dalam Pasal 20 ayat (1). Pemberhentian Advokat diatur pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 diantaranya memuat a) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan; b) permohonan sendiri; c) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau; d) berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

**Kata Kunci:** Profesi Hakim dan Advokat, Malpraktik, Penyelesaian Hukum.

### **Abstract**

The purpose of this study are as follows: a) To find out malpractice Judges and Advocates are regulated in criminal law: b) To find out the form of malpractice committed by judges and advocates in Decision No. 336 / K. Pid. Sus / 2015 and Decision Number 89 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN. Jkt. Pst; c) To find out the mechanism for resolving malpractice Judges and Advocates. For the giver of bribe,

Article 209 of the Criminal Code is imposed and Article 210 Paragraph (1) of the Criminal Code. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Articles 5, 6, 11 and 12 which essentially contain bribery; b) Forms of Malpractice Done by Judge Putusan No.336 / K. Pid. Sus / 2015 and Advocates in and Decisions Number89 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN. Jkt. Judge's Behavior in Decision No. 336 / K. Pid. Sus / 2015 violates the provisions stated in the Criminal Code Article 419 Paragraph (1). Article 12 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Acts taken by Advocates violate Indonesia's positive law, namely: Article 209 of the Criminal Code. Article 209 Paragraph (1) of the Criminal Code with a maximum of 2 (two) years 8 (eight) months imprisonment or a maximum fine of Rp. 4. 500.00, Article 210 Paragraph (1) KUHP and Law No. 20 of 2011 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption also regulates Bribery Providers, including Article 5 and Article 6; c) Dismissal of judges with disrespect is stated in Article 20 paragraph (1). Dismissal of an Advocate is regulated in Article 9, Article 10, Article 11 which includes a) Advocates stop or can be dismissed from their profession permanently for reasons; b) own application; c) sentenced to a criminal who has permanent legal force, because of a criminal offense that is threatened with a sentence of 4 (four) years or more; or; d) based on the decision of the Advocate Organization.

**Keywords:** Professional Judges and Advocates, Malpractice, Legal Settlement

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada kekuasaan belaka selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya seperti yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sehubungan dengan itu, tidak ada perbedaan dalam warga negara meskipun mereka memiliki profesi berbeda. Dalam hukum formil yang berlaku pada hakim sebagaimana dialami oleh profesi advokat. OC. Kaligis dan Hakim konstitusi Achil Mochtar keduanya meskipun sebagai profesi hukum, tapi

karena melakukan pelanggaran tetap harus di proses sesuai aturan yang ada. Namun, karena keduanya profesi hukum makaharus melalui proses peradilan umum dan peradilan profesi atau kode etik.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh profesi hukum disebabkan oleh kurangnya memahami kode etik profesi hukum, sehingga membuat profesi yang mulia mendapatkan penilaian yang negatif atau buruk. Adapun pelanggaran yang dilakukan ialah kasus suap pada

Kasus suap pada Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 yang menyeret nama Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtakarena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai dan Kasus suap Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Advokat OC Kaligis hakim menjatuhkan pidana oleh karena ituterhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Istilah malpraktik sering kita jumpai di dunia medis. Ada beberapa kasus yang melibatkan paramedis baik itu dokter, bidan ataupun perawat sebagai pelaku malpraktik. Malpraktik bisa dilakukan karena kelalaian maupun akibat kesengajaan. Kata malpraktik berasal dari Bahasa Inggris yaitu *malpractice* yang bisa berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik.<sup>1</sup>

Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan

---

<sup>1</sup> Uswatun Hasana, *Malpraktik Di Kalangan Profesional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal: Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.

tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata *mal* yang berarti buruk, sedangkan kata *practice* berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medis buruk. Bagi negara Indonesia, istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga kesehatan sebenarnya hanyalah merupakan suatu bentuk *Medical Malpractice*, yaitu *Medical Negligence* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kelalaian Medik. Menurut Martin Basiang *Malpractice* diartikan kealpaan profesi.<sup>3</sup>

Adakalanya paraprofesional hukum tersebut dalam menjalankan profesinya baik karena disengaja atau juga karena kelalaian ada yang pernah melakukan malpraktik yang dilihat dari kode etik yang mereka miliki merupakan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Kode etik profesi merupakan pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan profesinya agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menguraikan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: a) Bagaimana malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana?; b) Bagaimanakah bentuk malpraktik yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst?; c) Bagaimana mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat dalam Peraturan Hukum?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana: b) Untuk

---

<sup>2</sup>Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, hal. 23-24.

<sup>3</sup>Martin Basiang, 2009, *Law Dictionary*, Red and White Publishing, hal. 280.



mengetahui bentuk malpraktik yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam Putusan No. 336/K. Pid. Sus/ 2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/ TPK/2015/ PN.Jkt.Pst; c) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat.

## 2. METODE

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu hukum dipahami sebagai kaidah (norma), sebagai sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas.<sup>4</sup> Dalam hal ini Putusan Putusan No. 336/K.Pid.Sus/ 2015 dan Putusan Nomor 89/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada saat ini dan berlaku sebagai hukum positif.<sup>5</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam Hukum Pidana

Bagi pemberi suap dikenakan Pasal 209 KUHP. Pasal 209 Ayat (1) KUHP berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00:

1e barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

2e barang siapa memberi hadiah kepada seseorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1e sampai 4e.

---

<sup>4</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 46.

<sup>5</sup>Suratman& Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, hal. 229.

Pada Pasal 210 Ayat (1) KUHP menjelaskan:

- 1e Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- 2e barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.
- (2) Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan suatu hukuman dalam suatu perkara pidana yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1e sampai 4e boleh dijatuhkan.

Bagi penerima suap, diatur dalam KUHP sebagaimana dijelaskan pada Pasal 419 Ayat (1) berbunyi bahwa dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun pegawai negeri:

- 1e yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya
- 2e yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan kriteria bagi penyuap dan disuap. diantaranya sebagai berikut:

a) Pemberi Suap

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

#### b) Penerima Suap

##### Pasal 5 Ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

##### Pasal 6 Ayat (2)

dijelaskan bahwa: Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

##### Pasal 11 menjelaskan bahwa

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 menjelaskan bahwa

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

### **3.2 Bentuk Malpraktik yang Dilakukan oleh Hakim Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015**

Hukum mengandung 4 (empat) moralitas. Pertama, hukum merupakan moralitas untuk merumuskan tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat. Moralitas tindakan yang dianggap tidak bermoral tersebut tercermin dalam rumusan hukum pidana. Kedua, hukum merupakan moralitas yang merumuskan bagaimana orang berinteraksi sosial maupun moralitas fungsi-fungsi sosial, hal ini tercermin dalam hukum perdata. Ketiga, hukum merupakan moralitas bagi para praktisi hukum untuk bertindak secara profesional dalam pekerjaannya dengan mengacu pada moralitas praktisi hukum yang tercermin dalam asas-asas hukum. Keempat, secara keseluruhan hukum merupakan moralitas masyarakat tempat hukum tersebut dibuat dan dilaksanakan.

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Prancis) yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelaapan). Dalam bahasa Latin disebut

*briba* yang artinya *a piecof bread given t begger* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Pada perkembangannya *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.<sup>6</sup>

Para pencundang termasuk penyuap, tersuap dan broker suap berupaya mempercantik dan memperindah istilah suap dengan membubuhinya pada label nama beragam seperti hadiah, komisi, bea konsultasi, uang lembur dan pemerdaya lainnya.<sup>7</sup>

Perilaku Hakim pada PutusanNo. 336/K.Pid.Sus/2015 melanggar ketentuan yang tercantum pada KUHP yaituPasal 419 Ayat (1) berbunyi bahwa dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun pegawai negeri:

1e yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya

2e yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 12 Undang-undang No.20 Tahun2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

---

<sup>6</sup>Jurna; Edut Tech Volume 3 Nomor 2 September 2012

<sup>7</sup> Husain Syahatah, 2008, hal. 31.

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Tindakan yang dilakukan hakim tersebut telah memenuhi unsur pada tindak pidana, yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas sipelaku;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang hakim harus mematuhi kode etik profesi berupa pedoman perilaku. Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib memahami kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pengawasan internal hakim diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) tidak boleh mengurangi kekuasaan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pengawasan eksternal hakim menjalankan profesinya diawasi oleh sebuah Komisi Yudisial yang dijelaskan pada Pasal 40 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
- (2) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Kehakiman.

### **3.3 Bentuk Malpraktik Advokat Putusan Nomor 89/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN.Jkt.Pst**

Perbuatan yang dilakukan oleh Advokat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana dan termasuk kategori melakukan tindak pidana penyuapan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Advokat tersebut masuk dalam peraturan hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 209 KUHP. Pasal 209 Ayat (1) KUHP berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00:

1e barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

2e barang siapa memberi hadiah kepada seseorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- (2) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1e sampai 4e.

Pada Pasal 210 Ayat (1) KUHP menjelaskan:

1e Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.

2e barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang

akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

- (2) Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan suatu hukuman dalam suatu perkara pidana yang berslaah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1e sampai 4e boleh dijatuhkan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur terhadap Pemberi Suap, diantaranya yaitu:

#### Pasal 5

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### Pasal 6

- (2) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.



### 3.4 Mekanisme Penyelesaian Malpraktik Hakim Dan Advokat Dalam Peraturan Hukum

Profesi berbeda dengan pekerjaan dan bukanlah bisnis, karena dalam profesi itu diperlukan suatu keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan secara formal, tidak diorientasikan untuk memperoleh keuntungan, meskipun dalam profesi diperbolehkan untuk menentukan dan menerima honorarium. Demikian juga profesi hukum, yang disebut sebagai profesi yang terhormat (*ofcum nobile*), maksudnya mereka menjalankan tugas/kewajiban menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (para pihak dan masyarakat secara luas), dan mereka mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas/kewajiban dan wewenangnya. Selain itu bahwa mereka selalu mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi, maksudnya selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan kebenaran.<sup>8</sup>

#### a. Hakim

Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada huruf d bahwa: .Ternyata hakim tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pemberhentian terhadap hakim tidak hanyadilakukan dengan hormat, namun terdapat pemberhentian dengan tidak hormat Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Kuswardani, Widhia Kusuma Wardani, *Perizinan Dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana Dan Islam Terhadap Advokat)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN: 978-602-361-070-9, hal. 260.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat dilaksanakan dengan alasan:

- 1) Hakim yang dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Hakim yang melakukan perbuatan tercela.
- 3) Hakim yang melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan.
- 4) Hakim yang melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan.
- 5) Hakim yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6) Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Advokat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1) Penindakan

Pasal 6

1. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
  - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

2. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

#### Pasal 8

1. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

#### 2) Pemberhentian

##### Pasal 9

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

##### Pasal 10

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
  - c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

##### Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

#### 4.1.1 Malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam Hukum Pidana

Bagi pemberi suap dikenakan Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 Ayat (1) KUHP. Pokok dari kedua Pasal suap yang diatur pada KUHP adalah a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerak kannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; b) Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; c) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan kriteria bagi penyuap dan disuap. diantaranya Pasal 5, 6, 11, dan 12 yang intinya memuat perbuatan suap menyuap.

#### 4.1.2 Bentuk Malpraktik yang Dilakukan oleh Hakim Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Advokat dalam dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/TPK/PN.Jkt.Pst.

Perilaku Hakim pada Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 melanggar ketentuan yang tercantum pada KUHP yaitu Pasal 419 Ayat (1) berbunyi bahwa dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun pegawai negeri. Pasal 12 Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Advokat tersebut masuk dalam peraturan hukum positif Indonesia, yaitu: Pasal 209 KUHP. Pasal 209 Ayat (1) KUHP berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00. Pada Pasal 210 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur terhadap Pemberi Suap, diantaranya yaitu Pasal 5 dan Pasal 6.

#### 4.1.3 Mekanisme Penyelesaian Malpraktik Hakim Dan Advokat Dalam Peraturan Hukum

Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada huruf d bahwa Ternyata hakim tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pemberhentian terhadap hakim tidak hanya dilakukan dengan hormat, namun terdapat pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Penindakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 diantaranya memuat a) advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; b) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; c) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; d) melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; e) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. f) teguran lisan; g) teguran tertulis; h) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; i) pemberhentian tetap dari profesinya.

Pemberhentian Advokat diatur pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 diantaranya memuat a) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan; b) permohonan sendiri; c) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau; d) berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

#### **4.2 Saran**

- a. Diharapkan kedepannya para hakim melalui Komisi Yudisial melakukan seleksi ketat mengenai integritas seorang hakim, sehingga hakim tidak hanya baik secara intelektual akan tetapi juga secara perilaku agar tidak menjadi aktor dari tindak pidana suap menyuap.
- b. Diharapkan kedepannya PERADI menerapkan sistem yang lebih baik terhadap integritas Advokat, sehingga seorang Advokat benar-benar menjalankan profesinya dengan tujuan yang baik, adil maupun jujur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Basiang, Martin, 2009, *Law Dictionary*, Red and White Publishing, hal. 280.
- Hasanah, Uswatun, *Malpraktik Di Kalangan Profesional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal: Volume 15 Nomor 1 Juni 2015
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Banyumedia Publishing
- Kuswardani, Widhia Kusuma Wardani, *Perizinan Dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana Dan Islam Terhadap Advokat)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN: 978-602-361-070-9, hal. 260.

Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati.

Suratman & Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta

### **Jurnal**

Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana PELAKU Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Edut Tech Volume 3 Nomor 2 September 2012

### **Undang-undang**

KUHP

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst